

Dampak Desa Mandiri dalam Mengatasi kemiskinan di Desa Boidu Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango

The Impact of Self-Sufficient Villages in Alleviating Poverty in Boidu Village, Bulango Utara District, Bone Bolango Regency

Sainudin Latore¹⁾, Rauf A. Hatu²⁾, Farid Th. Musa³⁾, Musdalifah Achmad^{4*)}

¹²³⁴Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia

*Corresponding Author: achmadmusdalifah@gmail.com

ABSTRAK

Desa Boidu merupakan salah satu desa mandiri. Desa ini memiliki sumber daya alam yang melimpah, khususnya di bidang pertanian. Desa mandiri adalah desa yang mampu mewujudkan pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan melalui ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi. Namun, salah satu permasalahan utama yang dihadapi adalah tingginya angka kemiskinan di desa-desa mandiri, termasuk Desa Boidu. Oleh karena itu, berbagai upaya telah dilakukan oleh berbagai pihak untuk mengatasi masalah kemiskinan ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak program desa mandiri dalam mengatasi kemiskinan pada masyarakat Desa Boidu, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang memberikan gambaran permasalahan secara mendalam. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara, dan pencatatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, peran dan fungsi pemerintah dalam program desa mandiri untuk mengatasi angka kemiskinan di Desa Boidu telah dilaksanakan sesuai dengan proses yang ditetapkan. Namun, masih terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan tetap tinggi. Kedua, pelaksanaan program desa mandiri untuk mengatasi kemiskinan terus dilakukan. Ketiga, dampak program desa mandiri terhadap masyarakat miskin dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor usia dan faktor kesadaran diri. Dengan adanya program desa mandiri, kemiskinan memang belum sepenuhnya teratasi, tetapi angka kemiskinan dapat berkurang meskipun masih terlihat dari sudut pandang masyarakat.

Kata Kunci: Desa Mandiri; Program Pemerintah; Kemiskinan

ABSTRACT

Boidu Village is one of the self-sufficient villages. This village has abundant natural resources, particularly in agriculture. A self-sufficient village is one that can realize development to improve the quality of life and welfare of its residents sustainably through social, economic, and ecological resilience. However, one of the main problems faced is the high poverty rate in self-sufficient villages, including Boidu Village. Therefore, various efforts have been made by different parties to address this issue. This study aims to determine the impact of the self-sufficient village program in addressing poverty in the community of Boidu Village, North Bulango District, Bone Bolango Regency. The method used in this study is qualitative, providing an in-depth description of the issues. Data collection was carried out through observation, interviews, and recording techniques. The results of the study indicate that: First, the role and function of the government in the self-sufficient village program to address the poverty rate in Boidu Village have been implemented according to the established process. However, there are still several factors causing poverty to remain high. Second, the implementation of the self-sufficient village program to address poverty is ongoing. Third, the impact of the self-sufficient village program on the poor community is influenced by two factors: age and self-awareness. Although the self-sufficient village program has not fully resolved poverty, it has reduced the poverty rate, albeit still visible from the community's perspective.

Keywords: Self-Sufficient Village; Government Program; Poverty

PENDAHULUAN

Berdasarkan Keputusan Menteri PDTT Nomor 16 Tahun 2018, desa mandiri memiliki hak dan kewenangan untuk mengembangkan desanya demi mencapai kehidupan yang lebih berkualitas dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakatnya. Desa mandiri ini dapat didefinisikan sebagai desa yang mampu mengelola dan membangun desanya secara mandiri dengan memanfaatkan potensi dan kemampuan masyarakatnya secara optimal, tanpa bergantung pada bantuan dari pihak luar. Masyarakat desa mandiri memiliki sumber pendapatan sendiri yang berasal dari berbagai sektor, seperti pertanian, peternakan, perdagangan, dan industri kreatif. Semangat gotong royong yang kuat di antara masyarakat desa menjadi kekuatan utama dalam membangun desa secara bersama-sama. Keterampilan dan pengetahuan masyarakat desa terus ditingkatkan untuk meningkatkan pendapatan dan mewujudkan kemandirian desa. Melalui pemberdayaan, masyarakat desa didorong untuk menjadi individu yang kreatif, inovatif, dan mampu mengambil peran aktif dalam pembangunan desa (Priyono, 2019).

Stigma desa yang identik dengan ketertinggalan dan kemiskinan sering kali dikaitkan dengan faktor geografis dan topografis yang terpencil, jauh dari pusat perkotaan. Hal ini membatasi akses masyarakat desa terhadap berbagai peluang dan sumber penghidupan, sehingga memicu kesenjangan dan kemiskinan. Kemiskinan pada hakikatnya merujuk pada kondisi keterpurukan dan ketidakberdayaan individu, di mana mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup dasar. Ketidakmampuan ini diperparah dengan minimnya peran negara atau masyarakat dalam memberikan jaring pengaman sosial kepadaarganya (Suharto, 2013).

Desa mandiri diartikan sebagai desa yang mampu secara mandiri melaksanakan pembangunan yang meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi pilar utama untuk mewujudkan desa mandiri. Desa mandiri mencerminkan semangat juang masyarakat yang kuat untuk mencapai kemajuan, menghasilkan produk dan karya yang menjadi kebanggaan desa, serta mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri (Harjo, 2017).

Tujuan utama desa mandiri adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat pedesaan dalam mengembangkan usaha produktif dengan menggunakan sumber daya lokal. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan pangan, daya beli dan akses pangan bagi seluruh rumah tangga di desa. Upaya ini merupakan bagian dari Tujuan Pembangunan Milenium (MDG), khususnya mencapai kecukupan gizi bagi seluruh masyarakat. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi separuh kemiskinan global, khususnya di daerah pedesaan, pada tahun 2015 (Kuswari, 2022).

Meskipun berkeinginan menjadi desa mandiri, Desa Boidu tetap harus berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai pembangunan. Keterbatasan tersebut terlihat pada kapasitas pemimpin desa, masyarakat, tata kelola desa, dan sistem pendukung yang tercermin dalam peraturan dan kebijakan pemerintah terkait desa. Hal ini mengakibatkan kurang optimalnya kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemanfaatan kegiatan pembangunan desa mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Menyadari hal ini, pemerintah melalui Kementerian Desa, di bawah mandat Undang-Undang Desa, menyediakan wakil-wakil di berbagai tingkatan untuk membantu pemerintah desa dalam kelancaran implementasi Undang-Undang Desa. Pembinaan dan pengelolaan staf asisten yang profesional diperlukan untuk melaksanakan Undang-Undang Desa. Penguatan kapasitas para profesional dan efektivitas pengelolaan staf profesional merupakan agenda strategis Program Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD).

Hasil observasi awal menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Desa Boidu mengalami fluktuasi selama pandemi COVID-19. Pada tahun 2020, angka kemiskinan melonjak hingga 17% akibat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Namun, seiring dengan meredanya pandemi, angka kemiskinan menunjukkan tren penurunan dan mencapai 11% pada tahun 2022. Meskipun angka kemiskinan menunjukkan perbaikan, terdapat peningkatan angka pengangguran dan faktor usia lanjut yang menjadi penghambat dalam mencari pekerjaan. Hal ini menunjukkan perlunya fokus pada pengentasan pengangguran dan pemberdayaan kelompok usia lanjut dalam upaya penanggulangan

kemiskinan. Tidak adanya pelatihan dan motivasi bagi masyarakat berpotensi memicu permasalahan sosial yang lebih kompleks, seperti kelaparan, kemiskinan yang semakin parah, dan peningkatan kriminalitas. Salah satu fokus utama adalah mengatasi kemiskinan di desa mandiri, meskipun angka kemiskinan masih tergolong tinggi. Berbagai upaya telah dirancang dan digalakkan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), untuk mengatasi masalah kemiskinan dan mencapai kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian permasalahan yang terjadi di lokasi penelitian, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak program desa mandiri dalam mengatasi kemiskinan pada masyarakat Desa Boidu, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan jenis penelitian yang fokus pada pengumpulan data kualitatif, seperti observasi, wawancara, dan dokumen, untuk memperoleh pemahaman lebih mendalam terhadap fenomena. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berpartisipasi langsung pada subjek penelitian dan pengambilan sampel dilakukan secara terus menerus untuk memperoleh informasi yang kaya dan mendalam (Anggito & Setiawan, 2018).

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan informan, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti artikel, hasil penelitian terdahulu dan data resmi desa. dikumpulkan langsung dari lokasi penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan catatan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan metode reduksi data, visualisasi data, dan inferensi (Piloguli et al., 2023).

Penelitian ini dilakukan di Desa Boidu, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango. Data penelitian dikumpulkan dari dua sumber yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara terhadap 8 orang informan yang meliputi 4 orang penyelenggara pemerintahan desa dan 4 orang masyarakat miskin, Serta waktu yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 20 Agustus sampai 31 Agustus 2023. Sedangkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumen resmi dari desa dan dari beberapa karya ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini (Sugiyono, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran dan Fungsi Pemerintah dalam Mengatasi kemiskinan di Desa Boidu

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, peran pemerintah sangat penting dalam menciptakan pembangunan yang seimbang dan berkeadilan, terutama di wilayah pedesaan dan kecamatan, dengan tujuan untuk mencegah kesenjangan sosial. Pembangunan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan masyarakat merupakan faktor utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga dapat mendorong kemandirian masyarakat lokal. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh para peneliti mengenai dampak dari desa mandiri untuk mengatasi kemiskinan di Desa Boidu, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango. Setidaknya, para peneliti juga sedikit menjelaskan tentang pentingnya peran dan fungsi pemerintah dalam program desa mandiri untuk mengatasi kemiskinan di Desa Boidu agar dapat dilaksanakan secara maksimal dan efektif, menciptakan model hubungan masyarakat yang harmonis, dan mendorong partisipasi masyarakat untuk mensukseskan program desa mandiri yang bertujuan mengatasi tingginya angka kemiskinan, terutama di kalangan warga Desa Boidu, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango.

Untuk itu, pemerintah Desa Boidu berperan dalam proses penguatan program pembangunan desa dan juga bertanggung jawab terhadap masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Kemiskinan di Desa Boidu disebabkan oleh berbagai hal, antara lain kurangnya pengetahuan, keterampilan, dan rendahnya tingkat pendidikan. Selain itu, di Desa Boidu masih banyak masyarakat yang belum bisa memenuhi kebutuhan hidup karena kepadatan penduduk dan mobilitas/migrasi, serta tingginya

jumlah generasi muda yang menganggur. Penjelasan tersebut didukung dengan hasil wawancara di Kecamatan Bulango Utara dengan Ibu Warni Yunus, S.E., yang menyatakan:

“Peran dan fungsi pemerintah sangatlah penting terutama dalam mengatasi problem-problem dalam masyarakat. Nah, Berbicara soal kemiskinan yang ada di desa itu sudah pasti ada di setiap pemukiman yang ada di desa nak, walaupun itu hanya satu dua orang yang dinyatakan sebagai masyarakat miskin. di karenakan berbagai banyak faktor tertentu misalnya adanya stunting, dan juga kurangnya kesadaran diri sendiri untuk bagaimana bisa bertahan hidup, ini yang perlu digaris besarkan karena kebanyakan orang sudah di fasilitasi tapi tidak tau cara menggunakannya bagaimna, contohnya dari pemerintah sudah menyediakan lapangan pekerjaan bagian pertanian tetapi ada masyarakat juga yang masih belum mau dalam berpartisipasi untuk bekerja, katanya masih malas, dan tidak mau bekerja di lahan yang terbuka dan ini banyak terjadi dikalangan anak muda sekarang.”

Merujuk wawancara dengan Ibu Warni Yunus tersebut, diketahui bahwa pada kenyataannya desa yang disebut sebagai desa mandiri tidak selalu memiliki masyarakat yang 100% sejahtera. Pemerintah juga melakukan upaya untuk mencegah angka kemiskinan meningkat kembali, termasuk dengan melaksanakan program pemberdayaan dan pembangunan desa. Namun, diperlukan partisipasi dan kesadaran diri masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam melaksanakan program yang ada. Peran serta dan fungsi pemerintahan di Desa Boidu dilaksanakan sesuai dengan kemampuan desa dan kewajibannya sebagai perangkat desa. Seperti yang dijelaskan dalam teori Manusia Talcott, teori struktural-fungsional menguraikan empat konsep yang menekankan struktur sosial dan hubungan antar struktur yang saling mendukung untuk mencapai keseimbangan dinamis. Prinsip Rasionalitas Talcott menyatakan bahwa tindakan manusia diarahkan pada tujuan tertentu. Lebih lanjut, tindakan tersebut terjadi dalam kondisi di mana faktor-faktor tertentu bersifat pasti, sementara faktor lain digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut.

Seperti yang telah ditunjukkan oleh para peneliti, diperkenalkan teori struktur fungsional yang dikemukakan oleh Talcott Perosns, yaitu ada empat sistem sosial yang harus dijaga, terutama dikenal dengan akronim AGIL (*Adaptation, Attachment Goals/Maintenance target, Integration, Latency/pattern retensi*). Teori ini meyakini bahwa integrasi ke dalam masyarakat akan berlangsung dengan baik dan normal apabila unsur atau subyek yang bersangkutan dapat menjalankan fungsi dan strukturnya dengan baik (Prasetya et al., 2021).

Pemberdayaan Desa Mandiri di Desa Boidu Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango mencakup semua pembangunan di segala bidang. Melalui pembangunan desa dilakukan usaha agar masyarakat mempunyai kualitas dan kemampuan guna menanggulangi seluruh tantangan ataupun hambatan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Pelaksanaan Program Desa Mandiri dalam Mengatasi Kemiskinan di Desa Boidu

Perencanaan pembangunan desa merupakan pedoman penting untuk menggali potensi dan gagasan pembangunan desa, dengan fokus utama pada partisipasi masyarakat dalam keseluruhan prosesnya. Hal ini sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat, karena dengan partisipasi aktif maka berbagai kegiatan pembangunan di suatu daerah dapat terlaksana secara maksimal dan mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut petugas perencanaan desa di Boidu, program desa mandiri yang dicanangkan pemerintah bertujuan untuk mengatasi tingginya angka kemiskinan di desa. Inti dari program yang ditetapkan pemerintah ini adalah sebagai berikut:

“Kalau disini dek program yang dilaksanakan pemerintah salah satunya yaitu salah satunya ketahanan pangan dimana dalam program ini termasuk juga sebagai membantu masyarakat miskin agar tetap terjaga dalam perekonomian keluarga mereka yaitu menjalankan dua kategori yaitu di bidang pertanian dan peternakan. Selain itu, di sini juga masyarakat diberi berbagai pelatihan yaitu cara bertani yang baik dan benar, pembinaan keagamaan dengan membentuk kelompok ibu-ibu majelis

ta'lim dan juga berupa bantuan kepada masyarakat miskin seperti bantuan PKH, BLT, BPNT dan lain-lain. Dan Alhamdulillah dengan program yang ada masyarakat miskin untuk di tahun ini sudah menurun angka kemiskinannya hanya saja ada beberapa faktor yang membuat mereka sudah memang dinyatakan sebagai masyarakat miskin ekstrim.”

Merujuk hasil wawancara dengan Ibu Rahmawati Adjami selaku Kepala Kasie Perencanaan, diketahui bahwa banyak program di Desa Boidu telah terlaksana dan memberikan bantuan yang signifikan bagi masyarakat miskin di Desa tersebut. Namun demikian, pada tahun 2022 lalu hingga saat ini, angka kemiskinan mengalami penurunan meskipun masih terdapat sebagian masyarakat yang dikategorikan sebagai masyarakat miskin ekstrim. Teori Talcott Parsons dalam pendekatan struktural fungsionalnya menyoroti struktur masyarakat dan hubungan antar berbagai struktur yang saling mendukung menuju keseimbangan dinamis. Hal ini sejalan dengan pandangan yang diungkapkan oleh Kepala Desa Boidu, Bapak Masrin Polihito, mengenai dampak dari program Desa Mandiri dalam mengatasi kemiskinan, seperti yang disampaikan beliau kepada peneliti sebagai berikut:

“Dalam pelaksanaan program desa terutama pemberdayaan masyarakat Alhamdulillah berjalan dengan baik, hanya saja ada beberapa kendala di tahun kemarin karena adanya covid-19 jadi angka kemiskinan terbilang tinggi, dan juga di tambah tahun ini belum ada penerimaan bantuan dari pemerintah, untuk kemiskinan di tahun ini ada 2 KK yang tergolong masyarakat miskin ekstrim. kemudian langkah awal untuk menuju menjadi desa mandiri yang pertama pengelolaan keuangan, realisasinya, pembangunan, penanganan stunting di Desa Boidu juga sudah lebih baik, dan PAD (Pendapatan Anggaran Desa) lebih besar dari semua desa yang ada di kecamatan bulango utara, dan untuk sistematisasi menjadi desa mandiri itu seperti yang saya katakan sebelumnya yaitu dari pengelolaan keuangan, pembangunan, penanganan stunting, PAD, kebersihan lingkungan, keamanan dan ketertiban.”

“Proses dalam menuju desa mandiri begitu banyak problem mulai dari penanganan stunting dan angka kemiskinan tetapi Alhamdulillah semua berkat dukungan juga bagi masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam program yang kami lakukan. kemudian mengenai masyarakat miskin desa boidu masih termasuk masyarakat miskin ekstrim, akan tetapi untuk penanganan masyarakat miskin sudah di programkan ke program desa mandiri yaitu jamban keluarga, dan Alhamdulillah berjalan dengan baik selama proses program desa mandiri berjalan. hanya saja mereka dinyatakan sebagai masyarakat miskin dikarenakan faktor usia, single parent (janda), serta kurangnya lapangan pekerjaan. kami juga sebagai pemerintah yang bertugas untuk melayani dan mensejahterakan masyarakat sudah berusaha sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawab kami, dan kami juga sudah mengupayakan untuk hal-hal yang menjadi kendala bagi masyarakat”.

Merujuk hasil wawancara dengan Kepala Desa Boidu, diketahui bahwa pemerintah desa telah melakukan upaya untuk mengatasi kemiskinan di Desa Boidu melalui program Desa Mandiri bagi masyarakat miskin. Namun, beberapa warga yang dianggap sebagai masyarakat miskin disebabkan oleh faktor-faktor seperti usia, status pernikahan tunggal (janda), serta kurangnya lapangan pekerjaan. Langkah awal yang dihadapi pemerintah Desa Boidu dalam mencapai status Desa Mandiri adalah penanganan stunting dan tingginya angka kemiskinan. Dengan usaha, dukungan, dan partisipasi dari masyarakat, akhirnya Desa Boidu berhasil meraih penghargaan sebagai Desa Mandiri. Seperti yang dikemukakan oleh Talcott Parsons dalam teori struktural fungsional, integrasi suatu sistem atau struktur sosial harus mampu mengatur hubungan antar komponen dan mengelola fungsi-fungsi lainnya seperti adaptasi, pencapaian tujuan, dan pemeliharaan pola. Hal ini akan menciptakan hubungan persatuan yang harmonis di antara komponen-komponen tersebut.

Menurut Parsons, model teoritis perubahan sosial berkaitan dengan bagaimana masyarakat berubah dan proses yang terjadi selama perubahan tersebut. Permasalahan penelitian ini fokus pada model peristiwa sosial, dengan menggunakan teori fungsionalisme struktural. Teori fungsionalisme struktural Parsons dikenal dengan empat fungsi tindakannya yang dikenal dengan skema “AGIL”. Teori ini menekankan keteraturan dan mengabaikan konflik dan perubahan dalam masyarakat. Konsep pokok teori ini adalah: fungsi, disfungsi, fungsi laten, fungsi manifes dan keseimbangan (*ekuilibrium*). Menurut teori struktural fungsional, masyarakat adalah suatu sistem sosial yang terdiri dari banyak bagian atau unsur yang mempunyai hubungan yang seimbang dan saling terintegrasi (Prasetya et al., 2021). Seperti dalam penelitian ini dimana suatu sistem sosial di dalamnya terdapat program pemberdayaan desa mandiri di Desa Boidu Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango guna mencakup semua pembangunan di segala bidang. Melalui pembangunan desa dilakukan usaha agar masyarakat mempunyai kualitas dan kemampuan guna menanggulangi seluruh tantangan ataupun hambatan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Dampak Program Desa Mandiri Bagi Masyarakat Miskin

Kemiskinan seringkali dipahami sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan merupakan akibat dari kesulitan dan kurangnya sarana untuk memenuhi kebutuhan dasar, terkait dengan sulitnya memperoleh pekerjaan yang layak dengan penghasilan yang mampu memenuhi kebutuhan pokok seseorang (Sumodiningrat & Wulandari, 2016).

Pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintahan Desa Boidu, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango, berupa program-program yang bertujuan mengurangi angka kemiskinan yang tinggi. Namun, meskipun berbagai program telah berhasil mengurangi angka kemiskinan di Desa Boidu, masih terdapat kendala seperti rendahnya kesadaran diri dan faktor usia yang menghambat aktivitas ekonomi sehari-hari. Hal ini menyebabkan terbentuknya kelompok masyarakat yang dikategorikan sebagai masyarakat miskin ekstrim. Berdasarkan informasi dari informan yang dihimpun oleh peneliti melalui observasi dan wawancara di Desa Boidu, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango, dampak dari program desa mandiri dalam mengatasi kemiskinan dapat dibagi menjadi dua faktor yang menjadi penyebab angka kemiskinan tetap tinggi, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor usia/umur

Masyarakat Desa Boidu, yang dinyatakan sebagai masyarakat miskin, menjadi acuan bagi pemerintah Desa Boidu karena tingginya angka kemiskinan. Mereka tidak memiliki pekerjaan karena usia mereka yang sudah tidak mampu lagi untuk bekerja. Mereka hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah. Informasi ini didapatkan dari wawancara peneliti dengan salah satu informan, Ibu Rina Amini (84 tahun), yang menyatakan bahwa:

“Ti oma nou skrang seorang janda, baru so tida mampu mo ba karja barat, sedangkan itu ti oma p anak-anak mo suru tinggal dgn dorang cumn ti oma tida mau ba kse susah p dorang. jadi ti oma skrng cumin b harap di bantuan yang dari pemerintah mo kase, pokoknya smua oma mo trima entah itu dari PKH dgn bantuan cumin barus bagutu. tapi juga ada kalanya kalau ti oma so tida ada apa-apa dirumah cumin anak itu mo datang ba kse kamari pa ti oma”.

Terjemahan:

“Nenek sekarang sudah seorang janda/single parent, sudah tidak bisa bekerja yang berat-berat. Kemudian anak nenek pengenajak nenek untuk tinggal bersama mereka tetapi nenek menolak karena tidak ingindi repotkan, sekarang nenek hanya bisa berharap bantuan yang diberikan oleh pemerintah, entah itu bantuan berupa PKH dan lain-lain. Ada juga dari anak-anak nenek yang sering member”.

Merujuk hasil wawancara dengan Ibu Rina Amini (usia 84 tahun), diketahui bahwa informan tersebut tidak lagi mampu bekerja dikarenakan faktor usianya yang dianggap tidak layak untuk bekerja. Anak dari Ibu tersebut juga menginginkan agar ibunya bisa hidup bersama mereka. Namun, pilihan ibu untuk tetap tinggal di rumah sendirian, meskipun sebagai seorang janda, dan beliau hanya mengharapkan bantuan dari pemerintah. Hal ini sesuai dengan teori struktural fungsional Talcott Parsons yang menyatakan bahwa adaptasi individu dalam suatu masyarakat harus mampu beradaptasi dengan lingkungannya dan menyesuaikan kebutuhannya. Selain itu, hasil wawancara juga mencakup pendapat dari salah satu anak Ibu Rina, yang bernama Ibu Sumarni, sebagai berikut:

“Saya p mama skrang itu so kurang hidup sebatang kara di rumah tua ini, saya pe papa s meninggal so lama semenjak saya abis menikah. baru ti oma ini saya smo pangge tinggal dirumah, cuman ti oma yang tida mau krna itu dia mo bilang kamari tida mau ba kse susah p trng dpe anak-anak. torang ini ada dua basudara saya pe ade olo so menikah cuman dia merantau. jadi so kurang saya yang jaga datang-datang lia pa ti oma dsni. cuman Alhamdulillah saya p mama setiap ada bantuan bagitu dari pemerintah slalu m dpa entah itu dari bantuan baras atau semabako slalu mo dapa ati. torang olo sebagai anak ada jaga kase pa ti mama.”

Terjemahan:

“Ibu saya sekarang sudah tinggal sebatang kara dirumah ini, ayah saya sudah meninggal semenjak saya habis menikah. Dan saya berniat untuk mengajak ibu saya tinggal bersama kami hanya saja ibu menolak karena beliau tidak mau merepotkan anak-anaknya. Oleh karena itu, saya sebagai anak yang datang untuk melihat keadaan kondisi ibu saya, dan alhamdulillah ibu saya setiap ada bantuan dari pemerintah sering mendapatkannya”.

Hasil wawancara dengan kedua informan mengenai dampak program Desa Mandiri bagi masyarakat miskin di Desa Boidu menunjukkan bahwa program tersebut telah berdampak langsung terutama bagi mereka yang berada dalam kondisi kekurangan. Namun, kemiskinan tetap menjadi masalah yang dihadapi karena berbagai faktor, salah satunya adalah faktor usia yang tidak memungkinkan untuk bekerja, seperti yang dialami oleh informan pertama. Peran pemerintah sangat penting dalam perlindungan dan pemberdayaan masyarakatnya. Peran ini merupakan aspek dinamis dari status seseorang. Ketika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan statusnya, ia sedang menjalankan perannya.

Sebagaimana dijelaskan Ho Chi Minh dalam teori struktural-fungsionalnya, institusi sosial diakui keberadaannya hanya jika berhasil memenuhi tugas dan fungsinya. Hal ini sesuai dengan kesaksian dua orang informan yang mengungkapkan bahwa Pemerintahan Desa Boidu telah menjalankan fungsinya secara maksimal dan memberikan dampak positif bagi masyarakat yang membutuhkan. Menurut Talcott Parsons, tindakan individu manusia mempunyai tujuan dan dilakukan dalam kondisi tertentu, dengan faktor lain yang berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan latar belakang tersebut, Pemerintah Desa Boidu telah menunjukkan kinerja yang baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Ritzer, 2013).

2. Faktor kesadaran diri sendiri

Keadaan penduduk miskin yang masih berada dalam garis kemiskinan antara lain penduduk yang berpendapatan rendah, tidak memiliki pendapatan tetap, atau tidak memiliki pendapatan sama sekali. Kemiskinan adalah suatu kondisi di mana seseorang tidak mampu menghidupi dirinya sendiri sesuai dengan taraf hidup keluarganya dan juga tidak mampu menggunakan tenaga mental dan fisiknya. Keadaan kemiskinan di desa Boidu jatuh ke dalam kemiskinan ekstrim karena adanya kesadaran diri, enggan untuk bekerja, dan hal ini merupakan bagian dari kemiskinan kultural, di mana kemiskinan berasal dari kebiasaan dan sikap masyarakat yang merasa nyaman dan tidak ingin memperbaiki

kehidupannya. Masyarakat hidup seperti masyarakat modern. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Ketu Supu (65 tahun):

“Jadi nou, ti ibu skrang kalau m bilang bakarja mau cuman ibu pe suami tida boleh mo tinggal karena sakit so lama, baru ti ibu so berumur 65 tahun anak 2, baru ibu pe anak tida mau m suru ba karja utii soalnya dia bilang gengsi mo ba karja utii, ada kalanya kalau ti ibu mo dp pange sama dengan ba cuci baju atau ba masa pa orang bagitu anak-anak yang mo suru ba jaga dorang pe papa atii. itu pun kalau ada yang ba pangge ba karja nou, kalau tida ada yah cuman jadi ibu ibu rumah tangga bagini. jadi skrang alhamdulillah masih jaga ba trima bantuan dari desa pokoknya macam-macam mo trima kamari dgn Alhamdulillah bisa membantu biar cuman sadiki-sadiki”.

Terjemahan:

“Jadi begini ibu sekarang kalau mau dibilang pengen bekerja hanya saja suami saya tidak bisa ditinggal karena sedang sakit yang sudah lama, sekarang saya berumur 65 tahun anak 2, kemudian anak saya tidak pengen ada yang bekerja alasanannya gengsi untuk bekerja, dan di samping saya dipanggil untuk mencuci baju dan bekerja di rumah tetangga, anak-anak saya menjaga ayah mereka. Dan sekarang alhamdulillah masih menerima bantuan dari desa entah itu dari bantuan apapun”.

Merujuk hasil wawancara dengan Ibu Ketu Supu, diketahui bahwa informan masih mampu untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari meskipun suaminya sedang sakit. Namun, kedua anak mereka belum bersedia untuk bekerja karena kurangnya kesadaran diri dan kurangnya dukungan dari lingkungan keluarga mereka. Selain itu, diperlukan pelatihan dari pemerintah mengenai dunia kerja untuk memotivasi anak-anak muda di Desa Boidu. Berikut adalah hasil wawancara dengan anak Ibu Ketu Supu, Tiar Wahidji:

“Kalau soal bekerja saya bisa, cuman belum bisa terjun langsung bgtu di dunia pekerjaan diluar sana apalagi dibawah tekanan dari atasan bagitu, tapi kalau soal membantu orang tua di sawah bgtu ada kalau misalnya saya pe mama ada karja p orang bgtu, saya yang mo pigi ba karja di kobong dg saya pe kaka, soalnya saya p papa kan juga skrng masih jatuh sakit jadi saya dg saya p kaka yang mo turun ba kerja tapi kalau saya itu kadang-kadang.”

Terjemahan:

“Berbicara soal pekerjaan saya bisa hanya saja belum bisa terjun langsung di dunia pekerjaan diluar sana apalagi dibawah tekanan dari atasan. Akan tetapi membantu orang tua dalam mengurus lahan persawahan saya bisa dan itu saya ditemani dengan kakak saya ketika ibu saya ada panggilan pekerjaan dari tetangga.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan dua informan mengenai dampak program Desa Mandiri, diketahui bahwa penting untuk meningkatkan kesadaran diri agar dapat berkembang lebih baik dengan dukungan dan dorongan dari keluarga serta pemerintah. Hal ini dapat meningkatkan pemahaman mereka terhadap dunia kerja dan menjadi salah satu cara pemerintah untuk peduli terhadap masyarakatnya, khususnya generasi muda yang kurang berpengetahuan. Artinya, jika terdapat pelatihan atau sosialisasi mengenai dunia kerja yang dilakukan dengan tepat, itu sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan mengatasi pengangguran. Perspektif ini dapat diamati dari sudut pandang sosiologi, terutama teori struktural-fungsional.

Pada konteks ini kita dapat memeriksa aspek struktural kemiskinan melalui pola hidup dan perkembangan masyarakat miskin. Asumsi yang mendasarinya adalah bahwa kemiskinan di kalangan masyarakat miskin tidak hanya disebabkan oleh "kelemahan pribadi", melainkan juga oleh keterbatasan kapasitas masyarakat dalam menyadari pentingnya kesadaran diri yang lebih baik,

pengelolaan yang efektif, dan kurangnya inisiatif untuk mengembangkan usaha sendiri guna mencapai tujuan tersebut dan keluar dari lingkaran kemiskinan.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam mengatasi kemiskinan di Desa Boidu, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango sangatlah penting. Melalui program Desa Mandiri, pemerintah telah berusaha mengurangi angka kemiskinan dengan memberdayakan masyarakat melalui berbagai program seperti pelatihan pertanian, bantuan sosial, dan pemberdayaan ekonomi. Meskipun berhasil menunjukkan penurunan angka kemiskinan, masih terdapat beberapa tantangan seperti faktor usia dan rendahnya kesadaran diri dalam menghadapi kondisi ekonomi yang sulit. Dalam konteks teori struktural fungsional Talcott Parsons, pemerintah bertindak sebagai integrator yang mengelola fungsi-fungsi sosial untuk mencapai keseimbangan dinamis dalam masyarakat. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat agar program-program ini dapat berdampak lebih luas dan berkelanjutan dalam mengentaskan kemiskinan di Desa Boidu.

Daftar Referensi

- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Peneletian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak.
- Harjo, B. (2017). Model Membangun Desa Mandiri. *Jurnal Sosial Dan Humanis Sains*, 2(1), 27-35. <https://doi.org/https://doi.org/10.24967/jshs.v2i1.106>
- Kuswari, L. (2022). Efektivitas Program Desa Mandiri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Skripsi*, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Pilonguli, F., Ibrahim, R., & Hatu, D. R. R. (2023). Konflik Masyarakat dan Perusahaan Desa Motoduto Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo. *Dyanamics of Rural Society Journal*, 1(2), 93-100. <https://doi.org/https://doi.org/10.37905/drsj.v1i2.26>
- Prasetya, A., Nurdin, M. F., & Gunawan, W. (2021). Perubahan Sosial Masyarakat dalam Perspektif Sosiologi Talcott Parsons di Era New Normal. *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 11(1), 1-12. <https://doi.org/https://doi.org/10.17509/sosietas.v11i1.36088>
- Priyono, F. D. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Program Gerakan Desa Membangun (GERDEMA) Di Desa Pulau Sapi Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau. *Jurnal Administrative Reform*, 7(2), 97-109. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.52239/jar.v7i2.3086>
- Ritzer, G. (2013). *Sosiologi Sebagai Ilmu Penngetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2014). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2013). *Kemiskinan Dan Perlindungan Sosial Di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Sumodiningrat, G., & Wulandari, A. (2016). *Membangun Indonesia Dari Desa*. Yogyakarta: Media Presindo.